

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peran pemberdayaan usaha kecil, dan menengah oleh Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai tidak berjalan optimal. Peran yang telah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, pemberdayaan UKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut. Terutama paradigma masyarakat sebagai pelaku usaha yang cenderung masih pragmatis dalam memandang strategi pemberdayaan yang dirumuskan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai. Sehingga secara garis besar pemberdayaan UKM di Kabupaten Manggarai dapat dikatakan belum berjalan optimal.

Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai telah menyusun formulasi strategi dalam memberdayakan sekaligus mengembangkan UKM melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Manggarai cukup tinggi. Ini ditandai dengan minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan

yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan UKM di Kabupaten Manggarai pada fase ini sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM di Koperasi Kabupaten Manggarai. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UKM di Kabupaten Manggarai seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun kegiatan lainnya dapat berjalan optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.
2. Masyarakat sebagai pelaku UKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyadaran sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gie Kien, K. 2003. *Perekonomian Indonesia Tahun 2004. Prospek dan kebijakan Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta
- Taneko, Soleman B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial dan System Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung
- Soekanto, Soerjono , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi Jilid I*. Erlangga: Jakarta
- Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rineka Ciptaa
- Berry, David. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosisologi*. Jakarta: Rajawali
- Bagong, Suyanto. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung:

Alfabeta

Suharto,Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung:

PT Refika Aditama

Siagian, 2013, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bumi aksara, jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Konsep Pemberdayaan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Kemitraan Usaha